

**PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

PRASTIWI WAHYUNINGRUM

NIM : C 100 110 118

FAKULTAS HUKUM

UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

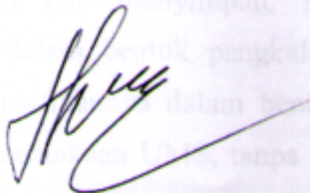
Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

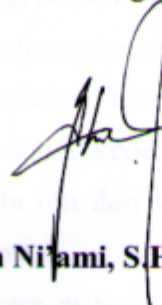
Tanggal : 30 Oktober 2015

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II



(Mutimatun Nizami, S.H., M.Hum)

Mengesahkan

a. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)**

Prastiwi Wahyuningrum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
prastiwi@ yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah serta akibat yang timbul setelah perkawinan dibatalkan. Metode yang digunakan metode pendekatan normatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni membuat daftar pertanyaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim memutuskan membatalkan perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jumapolo Kabupaten Karanganyar tidak berkekuatan hukum, sehingga perkawinan batal demi hukum. Sedangkan akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra, adalah perkawinan batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Kata kunci: pembuktian, pembatalan perkawinan, wali nikah tidak sah

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration in determining the evidence and the verdict on the case of cancellation of marriage because of the status of guardians are not valid and the consequences that arise after the marriage was canceled. The method used method normative approach with descriptive approach. Types and sources of data consists of primary data in the form of interviews and secondary form of literature. Data were collected through library research and field studies that create a list of questions and interview, then analyzed by qualitative analysis method. The results showed the judge in determining the verdict is based on evidence and facts the trial in accordance with Article 22 of Law No. 1 of 1974 and Article 21 paragraph (1) Compilation of Islamic Law (KHI), the judge decided to cancel the marriage issued by the Office of Religious Affairs Jumapolo Karanganyar not legal force, so that the marriage null and void. While the legal consequences after the marriage was canceled by Judgments Religion Karanganyar Number: 0004/Pdt.G/011/PA.Kra, is the marriage null and void and the marriage is deemed never existed, but not retroactive to the children who are born, husband or wife in good faith, except to the joint property when a marriage annulment based on the existence in the first marriage, and three other people as long as they acquire rights in good faith before a decision on the cancellation of the law has remained.

Keywords: verification, annulment of marriage, guardian of marriage invalid

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia pun tak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).²

¹ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal 1.

² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, Hal 22.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan peraturan lainnya yang menyangkut mengenai perkawinan. Untuk pengertian perkawinan termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Namun dalam KUHPer tidak memuat mengenai definisi atau arti dari perkawinan, akan tetapi pemahaman mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 26 KUHPer dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dengan kata lain perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut berarti untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga untuk warga negara Indonesia yang bukan penganut agama Islam dalam perkawinannya harus berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya mendasarkan pada ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Apabila dalam perkawinan tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Batalnya perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun

1974 dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Pembatalan perkawinan selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, dapat juga dikarenakan perkawinan yang telah dilangsungkan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila yang melangsungkan perkawinan para pihak beragama Islam, ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh, (2) Wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab dan (b) wali hakim.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan salah satunya menggunakan wali nikah yang tidak sah dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh keluarga, suami atau istri, pejabat yang berwenang kemudian sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, sesuai dengan kewenangan pengadilan tersebut. Apabila kedua pihak beragama Islam maka pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Agama sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah para pihak tersebut beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah dan untuk mengetahui akibat yang timbul setelah perkawinan dibatalkan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder³ yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin,⁴ berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni membuat daftar pertanyaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah

Pada hakikatnya, seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar-tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia harus mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hukum yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar terjadi atau tidak. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian yang perlu diperhatikan adalah bukti-bukti apa saja yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon.

³ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, Hal 7.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal 10

Dalam Hukum Acara Perdata. Tidak dapat dibuat satu patokan umum batas minimal pembuktian. Hal itu terjadi disebabkan setiap alat bukti memiliki sendiri nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya. Seperti yang diketahui, dalam Pasal 164 HIR yang terdiri: (a) Alat bukti tertulis (surat), (b) Alat bukti keterangan saksi; (c) Alat bukti persangkaan; (d) Alat bukti pengakuan, dan (e) Alat bukti sumpah.⁵

Tujuan pembuktian secara yuridis yakni menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara. Dari peristiwa yang telah pasti (terbukti) kebenarannya tersebut, hakim harus mengkualifikasikan-nya menjadi peristiwa hukum dan kemudian memberi konstitusinya sebagai akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Secara tidak langsung maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.⁶

Terkait dalam hal ini pembuktian berdasarkan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah, pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, namun pada perkara Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra yang mengajukan pembuktian adalah pihak Pemohon saja, karena Termohon tidak mempunyai bukti-bukti yang akan diajukan.⁷ Pemohon pada perkara ini mengajukan bukti tertulis, bukti tertulis tersebut berupa fotocopy Akta Nikah Nomor 278/38/IX/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

⁵Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Hal 123-124.

⁶ *Ibid.*

⁷Hasil Wawancara dengan Drs. H. Makmun, M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar, pada 14 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dilihat bahwa dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁸

Dalam perkara ini yang digunakan sebagai alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat yaitu: *Foto Copy* Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/38/IX/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

Masing-masing alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda. Alat bukti surat misalnya, jika alat bukti surat yang diajukan berupa akta otentik, selama akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lawan, pada diri akta otentik sudah tercapai batas minimal serta sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁹ Sehingga dalam hal ini terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II dalam melangsungkan pernikahan menggunakan wali nikah yang statusnya tidak sah yakni menggunakan wali nikah bapak tiri. Dengan ini perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat sah perkawinan.

⁸Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal 205

⁹M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, Hal 334-335

Hakim dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah yang Telah Terbukti di Pengadilan Agama Karanganyar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan, fakta yang terjadi dalam persidangan dan juga berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Pertama, kesimpulan pembuktian. Dalam beracara di persidangan antara Pemohon dan Termohon dapat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat alasan masing-masing pihak. Namun persidangan yang dilangsungkan pada perkara Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra pihak yang mengajukan alat bukti hanya pemohon saja, karena dari pihak Termohon tidak mempunyai alat-alat bukti untuk diajukan dalam persidangan. Alat bukti yang diajukan adalah alat bukti tertulis yakni surat yang berupa *Foto Copy* Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/38/IX/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II dalam perkawinannya dilangsungkan menggunakan wali nikah yang statusnya tidak sah yaitu menggunakan wali nikah bapak tiri. Dengan ini perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat sah perkawinan.

Kedua, pertimbangan hukumnya. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara pihak yang berselisih yaitu menetapkan

hubungan hukum, maka dalam putusan pengadilan terlebih dahulu ada pertimbangan-pertimbangan “mengenai duduk perkara” dan kemudian mempertimbangkan “mengenai hukumnya”.¹⁰

Perkara Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra wali nikah yang digunakan dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II ialah wali nikah yang statusnya tidak sah yakni wali nikah bapak tiri, oleh karena itu wali nikah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berdasarkan Pasal 20 KHI dan Pasal 21 KHI. Dengan demikian hakim memutuskan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan di KUA kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan menyatakan Akta Nikah Nomor: 278/38/IX/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan KUA kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tidak berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, putusan pengadilan. Yang menjadi dasar hukum putusan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah adalah menurut Majelis Hakim, berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, dengan semua biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat terlaksana disebabkan oleh ketidaksengajaan Pemohon, Termohon I dan

¹⁰ R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, Hal. 124

Termohon II serta ketidaktahuan ayah tiri Termohon II bahwa ayah tiri tidak dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan anak tirinya.

Akibat Hukum Setelah Perkawinan Dibatalkan

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya)¹¹. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹²

Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut.

Pertama, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Kedua, keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hal 300

¹² *Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Makmun, M.H bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara Nomor 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra yakni setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pada syarat dan prosedur untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut di atas, maka perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah ini seharusnya tidak terjadi, hasil wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa hal ini terjadi disebabkan karena ketidaktelitian Kepala Desa atas ketidaktelitian ketika memberikan surat keterangan untuk menikah, dan ketidaktelitian PPN dalam meneliti berkas pendaftaran nikah sehingga perkawinan tersebut dapat terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah dapat terjadi diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya: (1) Faktor

pendidikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan keabsahan sebuah pernikahan dengan wali yang sah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan keberadaan KUA sebagai pejabat yang berwenang mengawasi, mengarahkan dan memberikan pemahaman atas hukum terhadap masyarakat¹³; (2) Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan Hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. Termohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemohon, selang kurang lebih dua bulan setelah pernikahan ada informasi pengaduan masyarakat

¹³ digilib.uinsby.ac.id/10771/7/bab%204.pdf, di unduh pada Rabu, 14 Oktober 2015 Pukul 13.15 WIB

¹⁴ <http://web.iaincirebon.ac.id/simak/student/riset/BAB214102110021.pdf>, di unduh pada Rabu, 14 Oktober 2015 Pukul 20.30 WIB

bahwa pernikahan tersebut wali nikahnya tidak sah yakni menggunakan wali nikah bapak tiri, dengan demikian pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sah dan dapat dibatalkan karena menggunakan wali nikah yang tidak sah.

Hakim dalam menentukan pembuktiannya berdasarkan bukti yang telah diajukan secara benar oleh Pemohon dan fakta yang terjadi dalam persidangan. Terbukti bahwa ternyata wali nikah yang tertulis dalam Akta Nikah tersebut adalah bapak tiri Termohon II yakni Pak Mukino, padahal Wali Nikah yang seharusnya sesuai keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon I dan Termohon II adalah Pak Karjo yakni ayah kandung Termohon II.

Kedua, hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah yang telah terbukti di Pengadilan Agama Karanganyar. Berdasarkan pembuktian serta fakta dalam persidangan tersebut maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, menyatakan Akta Nikah Nomor: 278/38/IX/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jumapolo Kabupaten Karanganyar tidak berkekuatan hukum. Sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II batal demi hukum karena wali nikah yang tidak sah.

Ketiga, akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra, adalah perkawinan antara Termohon I dengan

Termohon II batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun tidak berlaku surut terhadap: (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Saran

Pertama, bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya untuk lebih mengerti dan memahami persyaratan perkawinan terutama persyaratan wali nikah, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, bagi Pegawai Pencatat Perkawinan, hendaknya pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketiga, bagi Lembaga Pengadilan menyelesaikan perkara sengketa antara suami isteri, hendaknya berhati-hati dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dimiyati, Khudzaifah. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS.
- Hadikusuma, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Mandar Maju
- Harahap, M. Yahya. 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini
- Mertokusumo, Sudikno. 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili. 1991, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media

Aturan Perundang-undangan

- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Web

- digilib.uinsby.ac.id/10771/7/bab%204.pdf, di unduh pada Rabu, 14 Oktober 2015 Pukul 13.15 WIB.
- <http://web.iaincirebon.ac.id/simak/student/riset/BAB214102110021.pdf>, di unduh pada Rabu, 14 Oktober 2015 Pukul 20.30 WIB.